

KETENTUAN DAN PERATURAN HUKUM KEGIATAN BISNIS

Oleh : Frans H. Winarta¹

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini dibutuhkan jiwa wirausaha dari setiap pelaku bisnis, yang diharapkan melalui kegiatan usahanya dapat menyediakan lapangan pekerjaan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bidang usaha yang dapat dijalankan dapat berbentuk Lisensi dan Waralaba (*franchising*), selain itu dapat juga dengan berbentuk badan usaha baik yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi persaingan global. Bentuk-bentuk kegiatan usaha tersebut memiliki ketentuan dan prosedurnya masing-masing. Pada saat ini, badan usaha yang paling diminati adalah Perseroan Terbatas ("PT") karena PT memiliki beberapa kelebihan antara lain kewajiban terbatas dari pemegang saham; masa hidup abadi yaitu aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, komisaris maupun direktur; efisiensi manajemen; dan penerapan prinsip *good corporate governance*.

Kata-kata Kunci : wirausaha, badan usaha, ketentuan dan prosedur kegiatan usaha.

I. PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik ("BPS"), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 adalah sebesar 37,17 juta (16,58%).² Sedangkan menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB"), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 apabila menggunakan parameter pendapatan US\$ 1/hari maka adalah sebesar 70 juta orang, dan apabila menggunakan parameter pendapatan US\$ 2/hari maka jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 120 juta orang.

Sedangkan berdasarkan data BPS, pada Februari 2007, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai 9,75% dari angkatan kerja atau 10,55 juta jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 108,13 juta jiwa.

Berdasarkan data dari BPS tersebut di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Keadaan tersebut membutuhkan

¹ Advokat di Kantor Hukum Frans Winarta & Partners, Governing Board Komisi Hukum Nasional, Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

² Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th. X", 2 Juli 2007.

